

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTIK

**PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL BERBASIS ADMINISTRASI DESA:
STUDI PADA DESA BUMI JAYA**



Disusun oleh :

SULASMAN

2211010149

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL KERJA PRAKTIK
PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL BERBASIS ADMINISTRASI DESA:
STUDI PADA DESA BUMI JAYA

Oleh :
SULASMAN
2211010149

Telah memenuhi syarat untuk diterima

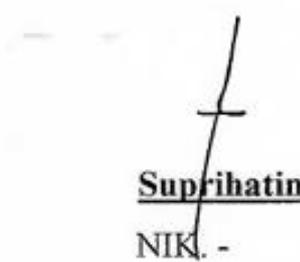
Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan



Ketut Artaya, S.Kom., M.T.I.
NIK. 13180913



Suprihatin
NIK. -

Menyetujui,

Kepala Program Studi Teknik Informatika



Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng
NIK. 011090305

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

- a. Nama : Sulasman
- b. NPM : 2211010149
- c. Prodi : S1-Teknik Informatika
- d. Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Selatan, 08 September 1973
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Desa Bumi Jaya, Kec. Candipuro, Kab.
Lampung selatan
- g. Suku : Jawa
- h. Kewarganegaraan : Indonesia
- i. Email : sulasman.2211010149.@darmajaya.ac.id
- j. No Handphone : 081369778371

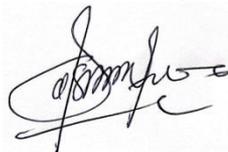
2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SD Candipuro
- b. Sekolah Menengah Pertama : SMP YPB Beringin
- c. Sekolah Menengah Kejuruan : SMK PKBM Alfala Cintamulya

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar.

Yang Menyatakan,

Bandar Lampung, 29 Agustus 2025



SULASMAN

NPM. 2211010149

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Kerja Praktik (KP) dilaksanakan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025. yang berjudul

“Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa: Studi pada Desa Bumi Jaya” dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan program studi SI-Teknik Informatika di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu **Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng.**, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika IIB Darmajaya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kerja praktik.
2. Ibu **Yuni Puspita Sari, S.Kom., M.T.I.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan laporan ini.
3. Bapak **Ketut Artaye, S.Kom., M.T.I.**, selaku Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan praktis selama kegiatan kerja praktik di Desa Bumi Jaya.
4. Bapak **Aris Mustofa, S.H.**, selaku Kepala Desa Bumi Jaya, beserta seluruh jajaran perangkat desa, yang telah memberikan izin dan menerima penulis dengan baik untuk melaksanakan kerja praktik serta membantu menyediakan data yang diperlukan.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moril dan materiel dalam penyelesaian laporan ini. Laporan ini membahas pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos). Pemilihan topik ini didasari oleh permasalahan nyata di Desa Bumi Jaya, di mana proses pendataan bansos yang masih manual sering kali menimbulkan kendala seperti duplikasi data, keterlambatan distribusi, dan kurangnya transparansi.

Melalui kerja praktik ini, penulis merancang sebuah sistem informasi berbasis administrasi desa yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan bansos.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, maupun secara praktis bagi Pemerintah Desa Bumi Jaya dan desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2025

Penulis,

RINGKASAN

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar kampus yang memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktik kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan dengan topik “Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa.” Latar belakang pemilihan tema ini adalah masih digunakannya sistem pencatatan manual dalam pendataan bantuan sosial (bansos), yang sering menimbulkan permasalahan berupa data ganda, keterlambatan distribusi, serta kurangnya transparansi.

Metode yang digunakan dalam kerja praktik meliputi observasi, wawancara dengan perangkat desa, studi literatur, serta perancangan sistem berbasis System Development Life Cycle (SDLC). Sistem yang dirancang menggunakan basis data digital dengan fitur utama input data warga, validasi NIK untuk mencegah duplikasi, klasifikasi jenis bantuan (PKH, BLT-DD, BPNT), laporan otomatis, dashboard monitoring real-time, dan publikasi data untuk mendukung transparansi.

Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan bansos. Proses yang sebelumnya memakan waktu 3–4 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sedangkan validasi NIK berhasil mengurangi potensi data ganda. Transparansi juga meningkat dengan adanya publikasi data penerima bantuan secara digital. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kemampuan perangkat desa dan infrastruktur teknologi, sistem ini terbukti memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, penerapan sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa di Desa Bumi Jaya memberikan perubahan signifikan dari sistem manual menuju digital yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan direplikasi di desa-desa lain sebagai model penerapan smart village berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci: Kerja Praktik, Bantuan Sosial, Administrasi Desa, Sistem Informasi, Smart Village

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Kerja Program KP	3
1.3 Manfaat dan Tujuan.....	4
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM.....	8
2.1 Sejarah Desa.....	8
2.2 Visi dan Misi Desa	10
2.3 Struktur Organisasi Desa.....	10
2.4 Kegiatan Desa	15
2.5 Lokasi Desa.....	18
BAB III PERMASALAHAN DESA	19
3.1 Analisis Permasalahan Desa	19
3.2 Landasan teori	20
3.3 Metode yang Digunakan	21
3.4 Rancang Program yang akan dibuat.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil	25
4.2 Pembahasan	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	31

DAFTAR PUSTAKA 34
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Struktur Organisasi	09
2.2 Peta Desa Bumi Jaya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menghadapi situasi kerja nyata. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan kerja dengan durasi minimal satu bulan dan menjadi bagian dari persyaratan kelulusan di Institut Informatika & Bisnis Darmajaya. Tujuan utama dari kegiatan KP adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui penerapan langsung teori yang telah diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan KP, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh keterampilan praktis serta pemahaman terhadap dinamika kerja di bidangnya masing-masing (Puspitasari & Nugroho, 2021; Fauziah & Vantissha, 2021; Apriliyani et al., 2022; Faridah et al., 2021).

Pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan yang memiliki peran penting dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Keberhasilan program bantuan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas administrasi desa dalam mengelola data penerima bantuan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak desa yang menghadapi kendala terkait validasi, transparansi, dan akurasi data penerima bansos. Sistem manual yang selama ini digunakan sering menimbulkan masalah seperti data ganda, keterlambatan distribusi, dan kesalahan pencatatan. Hal ini menegaskan perlunya inovasi berbasis teknologi informasi agar pengelolaan bansos lebih

efektif. Menurut (Wismayanti & Purnamaningsih, 2022), “transformasi digital di tingkat desa mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik hingga 70% dibandingkan sistem manual.”

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi peluang besar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem berbasis database dan aplikasi administrasi dapat digunakan untuk mempermudah pencatatan, pengarsipan, serta penyajian laporan bansos secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan konsep e-government yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik. (Zaliluddin et al., 2020) menyatakan bahwa “implementasi sistem informasi di desa tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah desa di mata masyarakat.” Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan bansos dapat mengurangi potensi konflik sosial akibat ketidakakuratan data.

Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu desa yang aktif menerima program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Namun, pengelolaan bansos di desa ini masih menghadapi sejumlah kendala. Proses administrasi yang dilakukan secara manual membuat perangkat desa kesulitan melakukan validasi data penerima. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Menurut (Prasetyo et al., 2022), “kegagalan dalam pengelolaan bantuan sosial seringkali dipicu oleh lemahnya sistem administrasi

desa yang tidak terintegrasi.”

Pemilihan topik kerja praktik “Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa” di Desa Bumi Jaya didasarkan pada urgensi kebutuhan desa akan sistem yang lebih modern, efektif, dan akuntabel. Dengan adanya sistem ini, perangkat desa dapat melakukan pencatatan dan distribusi bansos dengan lebih transparan dan terstruktur. Selain itu, sistem administrasi digital akan memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat karena pendistribusian bansos dilakukan berdasarkan data valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Indrajit, 2018) bahwa “teknologi informasi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tingkat lokal.”

Dengan demikian, pentingnya penelitian dan kerja praktik ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, melainkan juga pada kontribusinya dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Lebih spesifik, di Desa Bumi Jaya, penerapan sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa diharapkan menjadi solusi nyata atas permasalahan data ganda, keterlambatan distribusi, serta keterbatasan transparansi yang selama ini terjadi.

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program KP

Ruang lingkup kerja praktik ini mencakup analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa di Desa Bumi Jaya. Kegiatan utama meliputi:

1. melakukan observasi terhadap proses administrasi bansos yang sedang

berjalan

2. mengidentifikasi kendala dan kelemahan dari sistem manual yang digunakan
3. merancang sistem berbasis database untuk pencatatan dan validasi data penerima bansos
4. melakukan simulasi penerapan sistem pada perangkat desa.

Selain itu, lingkup kerja juga mencakup penyusunan laporan analisis serta rekomendasi perbaikan tata kelola administrasi bansos. Kerja praktik ini dibatasi pada lingkup administrasi bansos di tingkat desa dan tidak mencakup kebijakan bansos di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Fokus utamanya adalah menghasilkan rancangan sistem yang dapat diaplikasikan langsung oleh perangkat Desa Bumi Jaya. Ruang lingkup ini menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana penerapan teknologi informasi mampu memberikan dampak positif terhadap tata kelola bansos di desa.

1.3 Manfaat dan Tujuan

1.3.1 Manfaat

Kerja praktik ini memiliki beberapa manfaat. Pertama, bagi pemerintah desa, sistem yang dirancang dapat meningkatkan efektivitas administrasi bansos, mengurangi kesalahan input, dan mempercepat proses verifikasi data penerima. Transparansi juga meningkat karena laporan dapat disajikan secara digital dan mudah diaudit. Kedua, bagi masyarakat, sistem ini memberikan jaminan keadilan karena bantuan disalurkan berdasarkan data yang valid dan dapat diverifikasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga akan meningkat seiring dengan transparansi yang ditampilkan.

Selain manfaat langsung tersebut, terdapat juga manfaat tidak langsung. Misalnya, sistem ini dapat menjadi contoh atau best practice bagi desa lain dalam mengelola bansos. Jika sistem ini terbukti berhasil, maka model yang sama dapat direplikasi di desa-desa lain dalam lingkup Kecamatan Candipuro bahkan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara lebih luas.

Bagi mahasiswa, manfaat yang diperoleh adalah pengalaman langsung dalam menerapkan teori-teori Teknik Informatika, khususnya dalam bidang perancangan sistem informasi, ke dalam praktik nyata. Mahasiswa juga dapat mengasah kemampuan analisis, komunikasi dengan perangkat desa, serta keterampilan teknis dalam membangun sistem. Dengan demikian, kerja praktik ini bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga bagi mahasiswa sebagai calon tenaga profesional di bidang teknologi informasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan kerja praktik ini terbagi menjadi tujuan langsung dan jangka panjang. Tujuan langsung adalah merancang sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola bantuan di Desa Bumi Jaya. Sistem ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan data ganda, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan distribusi yang selama ini terjadi.

Tujuan jangka panjang adalah mendorong terwujudnya digitalisasi pemerintahan desa. Dengan penerapan sistem informasi, Desa Bumi Jaya dapat menjadi pelopor transformasi digital di Kecamatan Candipuro. Ke

depan, sistem ini dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya untuk pengelolaan bansos, tetapi juga untuk bidang administrasi lain seperti kependudukan, keuangan, dan pembangunan.

Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui ilmu yang diperoleh selama studi. Dengan demikian, kerja praktik ini membuktikan bahwa ilmu Teknik Informatika tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang nyata.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.4.1 Waktu

Kerja praktek ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 30 hari, yang terhitung sejak 22 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025.

1.4.2 Tempat Pelaksanaan

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan di Kantor Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.3 Ruang Lingkup Kerja

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III PERMASALAHAN LEMBAGA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Desa

Desa Bumi Jaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini mulai berkembang sejak era 1980-an melalui program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebagian besar penduduk Desa Bumi Jaya berasal dari Pulau Jawa, yang pada saat itu mengikuti program transmigrasi untuk membuka lahan pertanian di wilayah Lampung. Hal ini sejalan dengan pendapat (Windari, 2021) yang menyatakan bahwa “program transmigrasi di Indonesia pada dekade 1970–1980-an merupakan strategi pembangunan wilayah yang bertujuan membuka daerah baru dan meningkatkan produksi pertanian.”

Seiring waktu, Desa Bumi Jaya tumbuh menjadi desa agraris dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya padi, jagung, dan singkong. Lahan yang subur membuat sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian desa. Selain itu, sebagian masyarakat juga mulai mengembangkan usaha peternakan dan perdagangan kecil-kecilan untuk menunjang kebutuhan hidup. Menurut penelitian (Transmigrasi et al., n.d.) “desa-desa berbasis transmigrasi di Lampung memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan pangan karena kontribusinya terhadap produksi pertanian daerah.”

Dalam perjalanannya, Desa Bumi Jaya juga mengalami dinamika sosial, terutama terkait proses integrasi budaya antara masyarakat lokal

dengan para transmigran. Awalnya, terdapat perbedaan dalam pola hidup, bahasa, maupun tradisi. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu, integrasi sosial berjalan harmonis sehingga tercipta identitas desa yang lebih inklusif. Hal ini diperkuat oleh studi (Mukhtar et al., 2021) yang menjelaskan bahwa “proses interaksi sosial antara penduduk asli dan transmigran di Lampung berlangsung secara dinamis, menghasilkan pola adaptasi budaya yang saling melengkapi.”

Perkembangan Desa Bumi Jaya juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Pembangunan jalan desa, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan mempercepat perkembangan wilayah ini. Selain itu, dengan adanya dana desa sejak tahun 2015, Desa Bumi Jaya semakin mampu mengembangkan potensi lokal, baik melalui pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Menurut (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020), “dana desa berperan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan sekaligus meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.”

Kini, Desa Bumi Jaya dikenal sebagai salah satu desa di Kecamatan Candipuro yang cukup aktif dalam mengikuti program pembangunan pemerintah. Kehidupan masyarakat yang harmonis, didukung potensi pertanian yang melimpah, menjadikan desa ini memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan di Lampung Selatan. Latar belakang historis sebagai desa transmigrasi membuat Bumi Jaya memiliki karakter masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, termasuk dalam hal penerapan teknologi informasi untuk mendukung

administrasi pemerintahan.

2.2 Visi Dan Misi Desa

2.2.1 Visi

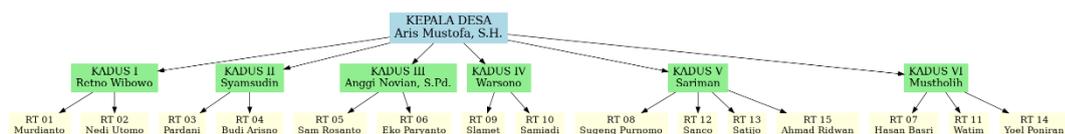
“Bumi Jaya Desa Wisata, Masyarakat Sehat Tertip Aman Dan Sejahtera”

2.2.2 Misi

1. Mengembangkan dan Meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
3. Menjaga adat, budaya, dan nilai kearifan lokal sebagai paket utama dalam kegiatan kepariwisataan.
4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Meningkatkan ketrampilan dan kualitas Sumber daya manusia di masyarakat.
7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
8. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

2.3 Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Bumi Jaya secara umum terdiri dari:



Gambar 2.1 Struktur organisasi pemerintahan Desa Bumi Jaya

Setiap posisi dalam struktur organisasi Desa Bumi Jaya memiliki

tanggung jawab yang krusial untuk menjamin bahwa setiap kegiatan dan program berjalan secara optimal, terarah, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa bumi jaya. Berikut ini merupakan gambaran umum mengenai tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing jabatan:

1. Kepala Desa: Aris Mustofa, S.H.

- a. Pimpinan tertinggi pemerintahan desa.
- b. Memimpin jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengelola keuangan dan aset desa sesuai peraturan.
- d. Menetapkan kebijakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Menjadi penanggung jawab utama seluruh kegiatan pemerintahan desa.

2. Kadus I: Retno Wibowo

- a. Membawahi RT 01 (Murdianto) dan RT 02 (Nedi Utomo).
- b. Mengkoordinasi pembangunan, keamanan, dan ketertiban di dusunnya.
- c. Menjadi penghubung aspirasi warga ke pemerintah desa.

3. RT 01 – Murdianto:

- a. Mengatur kehidupan masyarakat di lingkungan RT 01.
- b. Membantu pendataan kependudukan dan distribusi bantuan.

4. RT 02 – Nedi Utomo:

- a. Mengelola administrasi kependudukan tingkat RT.
- b. Memimpin kegiatan sosial, gotong royong, dan keamanan lingkungan.

5. Kadus II: Sulaiman

- a. Membawahi RT 03 (Pardani) dan RT 04 (Budi Arisno).
- b. Mengkoordinasikan pembangunan di wilayah dusun II.
- c. Mengawasi pendistribusian bantuan dan program desa.

6. RT 03 – Pardani:

- a. Memimpin warga RT 03 dalam urusan sosial dan administrasi.
- b. Membantu Kadus dalam pengumpulan data penduduk.

7. RT 04 – Budi Arisno:

- a. Menjaga keamanan lingkungan dan memimpin kegiatan gotong royong.
- b. Menjadi kontak pertama warga terkait pelayanan publik tingkat RT.

8. Kadus III: Anggi Novian, S.Pd.

- a. Membawahi RT 05 (Sam Rosanto) dan RT 06 (Eko Paryanto).
- b. Memastikan program desa berjalan di wilayah dusun III.
- c. Menjadi mediator antara warga dan perangkat desa.

9. RT 05 – Sam Rosanto:

- a. Mengatur pendataan bansos di wilayah RT 05.
- b. Menjadi koordinator kegiatan sosial.

10. RT 06 – Eko Paryanto:

- a. Mengawasi keamanan wilayah RT 06.
- b. Membantu pelaksanaan program ekonomi dan pertanian warga.

11. Kadus IV: Warsono

- a. Membawahi RT 09 (Slamet) dan RT 10 (Samiadi).
- b. Menjadi penanggung jawab pembangunan infrastruktur dusun IV.
- c. Mengawasi program bansos agar tepat sasaran.

12. RT 09 – Slamet:

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan di RT 09.
- b. Menjaga ketertiban sosial warga.

13. RT 10 – Samiadi:

- a. Memimpin kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan.
- b. Menjadi koordinator program sosial masyarakat.

14. Kadus V: Sariman

- a. Membawahi RT 08 (Sugeng Purnomo), RT 12 (Sanco), RT 13 (Satijo), RT 15 (Ahmad Ridwan).

- b. Mengkoordinasikan pembangunan fisik dan sosial di dusun V.
- c. Mengelola aspirasi warga agar disampaikan ke desa.

15. RT 08 – Sugeng Purnomo:

- a. Menjadi koordinator administrasi kependudukan tingkat RT.
- b. Menjaga keamanan lingkungan RT 08.

16. RT 12 – Sanco:

- a. Mengatur pelaksanaan program bantuan di RT 12.
- b. Membina kegiatan sosial kemasyarakatan.

17. RT 13 – Satijo:

- a. Menjadi penghubung warga RT 13 dengan Kadus.
- b. Memimpin gotong royong rutin dan kegiatan keagamaan.

18. RT 15 – Ahmad Ridwan:

- a. Bertanggung jawab atas pendataan penerima bantuan di RT 15.
- b. Mengorganisir kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan.

19. Kadus VI: Mustholih

- a. Membawahi RT 07 (Hasan Basri), RT 11 (Watim), RT 14 (Yoel Poniran).
- b. Mengkoordinasikan keamanan, pembangunan, dan administrasi di dusun VI.

- c. Menjadi perantara komunikasi warga dengan kepala desa.

20. RT 07 – Hasan Basri:

- a. Mengelola pendataan kependudukan di RT 07.
- b. Memimpin kegiatan gotong royong rutin.

21. RT 11 – Watim:

- a. Membantu pelaksanaan program bantuan sosial.
- b. Menjaga ketertiban lingkungan RT 11.

22. RT 14 – Yoel Poniran:

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan sosial dan keagamaan warga RT 14.
- b. Mengatur administrasi kependudukan tingkat RT.

2.4 Kegiatan Desa

1. Musyawarah Desa (Musdes) untuk Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara periodik (setidaknya sekali dalam setahun) dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan perempuan. Tujuan Musdes adalah membahas rencana pembangunan desa, menentukan prioritas penggunaan dana desa, serta menampung aspirasi masyarakat. Hasil musyawarah inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

2. Pendataan dan Penyaluran Bantuan Sosial (PKH, BLT, BPNT)

Desa Bumi Jaya secara rutin melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Proses ini dilakukan dengan verifikasi data kependudukan dan kondisi ekonomi keluarga. Setelah diverifikasi, bantuan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Perangkat desa juga melakukan monitoring agar bantuan tepat sasaran, transparan, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

3. Program Peningkatan Hasil Pertanian dan Ketahanan Pangan

Karena mayoritas penduduk Desa Bumi Jaya bekerja sebagai petani, pemerintah desa rutin mengadakan kegiatan penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, distribusi pupuk subsidi, dan pelatihan teknologi pertanian. Selain itu, desa juga mengembangkan diversifikasi tanaman agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan desa, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan UMKM

Pemerintah desa juga mendorong kegiatan ekonomi kreatif melalui pelatihan kewirausahaan. Bentuk kegiatan meliputi pelatihan

keterampilan mengolah hasil pertanian, pembuatan produk makanan olahan, kerajinan tangan, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan usaha. Pelatihan ini dilakukan bekerja sama dengan dinas terkait dan mitra perguruan tinggi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

5. Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya

Desa Bumi Jaya memiliki kegiatan sosial dan budaya yang terjaga dengan baik. Di antaranya pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, gotong royong kebersihan lingkungan, serta kegiatan seni dan olahraga. Kegiatan ini tidak hanya menjaga spiritualitas dan nilai budaya, tetapi juga mempererat persatuan antarwarga, baik penduduk asli maupun pendatang dari program transmigrasi.

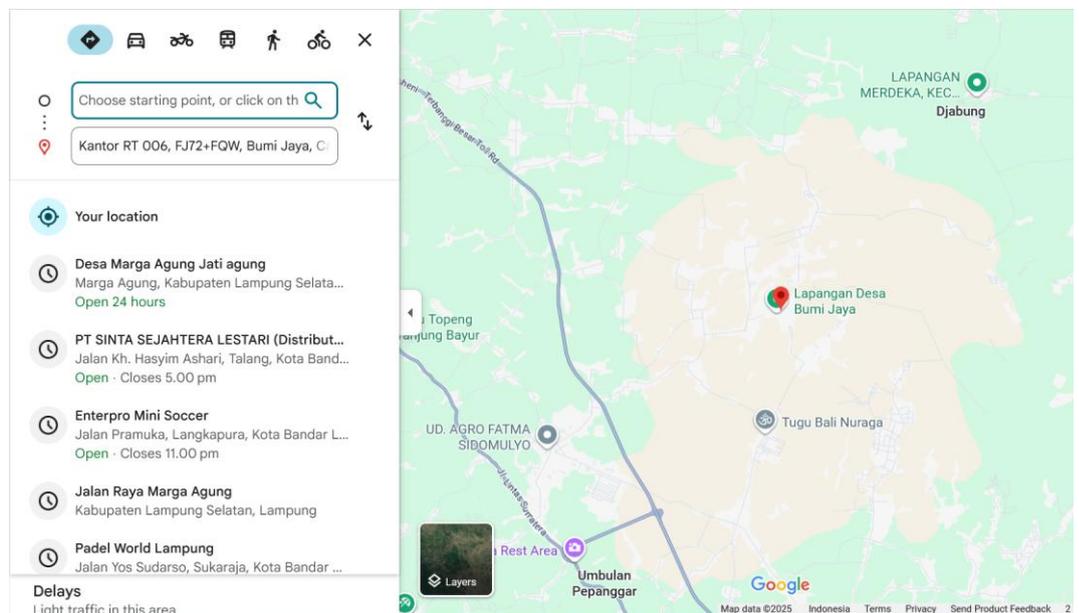
6. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

Salah satu kegiatan pembangunan fisik yang menjadi prioritas di Desa Bumi Jaya adalah pembangunan dan perbaikan jalan desa. Jalan merupakan infrastruktur vital yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Dengan adanya pembangunan jalan, akses transportasi menjadi lebih lancar, distribusi hasil pertanian lebih cepat, dan konektivitas antar-dusun semakin baik. Pembangunan jalan ini biasanya dibiayai dari Dana Desa serta partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Menurut hasil Musdes, prioritas pembangunan jalan

tidak hanya sebatas jalan utama desa, tetapi juga jalan-jalan lingkungan agar seluruh masyarakat merasakan manfaatnya.

2.5 Lokasi Desa

Desa Bumi Jaya terletak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Lokasi desa dapat diakses melalui jalur darat ± 20 km dari Kalianda, ibu kota Kabupaten Lampung Selatan. Secara geografis, desa ini berada di dataran rendah dengan lahan pertanian yang subur.



Gambar.2.2 Peta Desa Bumi Jaya

BAB III

PERMASALAHAN DESA

3.1 Analisa Permasalahan Desa

Pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya selama ini masih dilakukan secara manual melalui pencatatan di buku administrasi desa. Sistem pencatatan manual ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya potensi terjadinya data ganda, kesalahan input, serta keterlambatan dalam proses verifikasi. Kondisi tersebut menyebabkan perangkat desa sering menghadapi kesulitan dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial. Menurut (Prasetyo et al., 2022), “ketidaktepatan data penerima bantuan sosial sering menjadi penyebab konflik sosial di masyarakat desa.”

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengelola data berbasis digital. Hal ini menyebabkan inovasi dalam pengelolaan administrasi bansos sulit diimplementasikan. Akibatnya, proses distribusi bantuan sosial sering terlambat, bahkan ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil pendataan. (Zaliluddin et al., 2020) menyatakan bahwa “permasalahan bansos pada level desa bukan hanya soal dana, tetapi juga sistem administrasi yang belum efisien dan minimnya kapasitas aparatur desa.”

Masalah lain adalah rendahnya transparansi dalam penyaluran bansos. Masyarakat tidak selalu mendapatkan akses informasi mengenai kriteria penerima, jumlah bantuan, maupun mekanisme distribusinya. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah desa. Padahal, transparansi

merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut (Mukhtar et al., 2021), “transparansi dalam pengelolaan program bantuan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.”

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dapat dirumuskan adalah:

1. Pendataan penerima bantuan sosial masih manual sehingga rawan kesalahan.
2. Terjadi duplikasi data penerima yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran.
3. Minimnya transparansi distribusi bansos yang menurunkan kepercayaan masyarakat.
4. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data berbasis digital.

Dengan demikian, diperlukan solusi berupa sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa yang lebih modern dan akuntabel.

3.2 Landasan Teori

Teori yang menjadi dasar dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis administrasi desa adalah konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM). Menurut (Laudon & Laudon, 2019), SIM adalah “sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan.” Dalam konteks desa, SIM dapat digunakan untuk mengelola data penerima bansos secara akurat dan cepat.

Selain itu, konsep E-Government juga menjadi dasar teoritis dalam perancangan sistem ini. Menurut (Indrajit, 2018), “e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperluas partisipasi publik.” Dengan e-government, desa dapat menghadirkan tata kelola bansos yang lebih transparan dan efisien.

Teori lain yang relevan adalah Database Management System (DBMS). Sistem ini memungkinkan data penerima bantuan disimpan dalam basis data yang terintegrasi, sehingga meminimalkan duplikasi dan kesalahan input. Menurut (Supiyandi et al., 2022), “DBMS sangat efektif dalam mendukung integrasi data, validasi, dan penyajian laporan secara otomatis.”

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, maka perancangan sistem pengelolaan bansos di Desa Bumi Jaya akan berorientasi pada peningkatan akurasi data, efisiensi administrasi, serta transparansi kepada masyarakat.

3.3 Metode yang Digunakan

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses administrasi bansos di Kantor Desa Bumi Jaya. Penulis memperhatikan alur pendataan, mulai dari pengumpulan data warga, validasi, hingga distribusi bantuan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pencatatan masih menggunakan dokumen fisik, sehingga rawan terjadi kesalahan. Dengan observasi ini, penulis dapat mengidentifikasi kelemahan sistem manual dan

menemukan aspek yang perlu diperbaiki melalui sistem berbasis teknologi.

3.3.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan perangkat desa, khususnya kepala urusan kesejahteraan dan sekretaris desa. Wawancara bertujuan untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan bansos. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa masalah utama terletak pada kesulitan dalam validasi data dan keterbatasan tenaga untuk mengelola pencatatan manual. Informasi dari wawancara menjadi dasar dalam merancang sistem yang sesuai kebutuhan desa.

3.3.3 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait pengelolaan bansos dan penerapan sistem informasi di desa. Melalui studi ini, penulis menemukan bahwa penerapan sistem informasi mampu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan transparansi. Hasil studi literatur juga digunakan sebagai landasan teori dalam menyusun rancangan sistem yang diusulkan.

3.3.4 Perancangan System

Perancangan sistem dilakukan dengan metode System Development Life Cycle (SDLC), yang meliputi tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan evaluasi. Sistem dirancang berbasis database, dengan fitur utama yaitu input data warga, validasi NIK, laporan penerima bantuan, serta dashboard monitoring. Perancangan ini disesuaikan dengan kapasitas

perangkat desa agar mudah dioperasikan.

3.4 Rancangan Program yang Akan Dibuat

Rancangan program yang akan dibuat adalah sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis administrasi desa yang dapat membantu perangkat Desa Bumi Jaya dalam mengelola data penerima bansos secara lebih akurat dan transparan. Sistem ini dirancang berbasis database dengan tampilan antarmuka sederhana agar mudah digunakan oleh perangkat desa.

a. Fitur utama sistem meliputi:

1. **Input Data Warga** : Perangkat desa dapat memasukkan data penerima bansos berdasarkan NIK dan KK. Sistem akan melakukan validasi otomatis untuk mencegah duplikasi.
2. **Klasifikasi Jenis Bantuan** : Sistem dapat mengelompokkan penerima berdasarkan jenis bantuan (PKH, BLT-DD, BPNT).
3. **Laporan Otomatis** : Perangkat desa dapat mencetak laporan penerima bantuan secara cepat dan terintegrasi.
4. **Dashboard Monitoring** : Kepala desa dan perangkat terkait dapat memantau jumlah penerima bantuan secara real-time.
5. **Transparansi Data** : Sistem dapat menampilkan daftar penerima bantuan di papan informasi digital yang dapat diakses masyarakat.

Implementasi sistem ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelatihan perangkat desa untuk memahami cara penggunaan sistem. Selanjutnya, dilakukan uji coba input data penerima bantuan dan validasi hasil laporan.

Setelah tahap uji coba berhasil, sistem akan digunakan secara penuh dalam administrasi bansos desa.

Dengan rancangan program ini, diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi Desa Bumi Jaya dapat teratasi. Pendataan menjadi lebih akurat, proses distribusi lebih cepat, dan transparansi meningkat. Pada akhirnya, penerapan sistem ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Hasil dari kerja praktik ini adalah rancangan dan simulasi penerapan Sistem Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa pada Desa Bumi Jaya. Sistem ini dirancang untuk menjawab masalah yang selama ini dihadapi perangkat desa, yakni kesalahan pendataan, duplikasi penerima, keterlambatan distribusi informasi, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan bansos. Menurut (Harinin et al., 2020), sistem informasi administrasi yang terintegrasi dapat meminimalisasi potensi duplikasi data dan mempercepat proses pelayanan publik di tingkat desa.

Tahap awal pelaksanaan adalah observasi lapangan. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa perangkat desa masih mengandalkan buku register manual untuk mencatat penerima bantuan. Proses ini membutuhkan waktu lama dan sering menimbulkan perbedaan data antara arsip desa dengan data pusat. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Prasetyo et al., 2022), yang menjelaskan bahwa sistem manual dalam pendataan bansos menimbulkan inkonsistensi data antara desa dan dinas sosial kabupaten.

Setelah dilakukan identifikasi masalah, tim kerja praktik merancang sistem berbasis database yang memungkinkan perangkat desa memasukkan data penerima bantuan secara digital. Sistem ini memiliki fitur validasi NIK sehingga tidak ada data ganda yang masuk. Penerapan validasi ini sangat penting mengingat permasalahan utama bansos sering disebabkan oleh penerima ganda. Menurut penelitian (Noviarani & Chotijah, 2021), validasi

berbasis identitas tunggal seperti NIK dapat meningkatkan akurasi data bantuan sosial hingga 90%.

Hasil implementasi awal menunjukkan bahwa perangkat desa lebih mudah dalam melakukan input data. Dengan antarmuka yang sederhana, perangkat desa dapat memasukkan data nama, NIK, alamat, dan jenis bantuan yang diterima. Data tersebut secara otomatis tersimpan di database desa dan dapat dicetak menjadi laporan. Selain itu, laporan juga dapat dikategorikan berdasarkan jenis bantuan, sehingga mempermudah kepala desa dalam melakukan monitoring. Hal ini sesuai dengan pendapat (Zaliluddin et al., 2020), yang menyatakan bahwa penyajian laporan digital secara otomatis akan mempercepat pengambilan keputusan pemerintah desa.

Fitur lain yang berhasil diuji adalah dashboard monitoring. Dashboard ini menampilkan jumlah penerima bantuan berdasarkan kategori (PKH, BLT-DD, BPNT) secara real-time. Dengan fitur ini, kepala desa dapat memantau jumlah penerima tanpa harus memeriksa arsip manual. Keunggulan dashboard digital ini juga ditegaskan oleh (Mukhtar et al., 2021), yang menyatakan bahwa dashboard berbasis data real-time mempermudah pimpinan desa dalam mengambil keputusan strategis dengan cepat.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur transparansi data, di mana daftar penerima bantuan dapat diekspor ke format PDF atau Excel untuk kemudian dipublikasikan di papan informasi desa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai siapa saja penerima bantuan sosial, sehingga menekan potensi kecurigaan dan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggraeni & Uzaimah, 2024), yang menyatakan bahwa

transparansi dalam penyaluran bansos terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hasil simulasi penerapan sistem ini juga memperlihatkan bahwa proses pencetakan laporan bulanan menjadi lebih cepat. Jika sebelumnya perangkat desa membutuhkan waktu sekitar 3–4 hari untuk menyiapkan laporan bansos, dengan sistem baru laporan dapat dicetak hanya dalam hitungan menit. Efisiensi ini didukung oleh pernyataan (Idrus & Zakiyah, 2022), yang menjelaskan bahwa otomatisasi laporan melalui sistem informasi mampu menghemat waktu hingga 80% dibanding metode manual.

Selain hasil teknis, kerja praktik ini juga menghasilkan dampak non-teknis, yaitu peningkatan pemahaman perangkat desa tentang pentingnya teknologi informasi. Melalui pelatihan singkat yang dilakukan, perangkat desa mulai terbiasa menggunakan komputer untuk mengelola data bansos. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Menurut penelitian (Kurniawan et al., 2021), pemberdayaan perangkat desa dalam penggunaan teknologi informasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi e-government di pedesaan.

Secara keseluruhan, hasil kerja praktik ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya. Sistem ini tidak hanya membantu perangkat desa, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menghadirkan informasi yang lebih terbuka dan akuntabel.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dari hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu menjawab kebutuhan perangkat desa. Dengan adanya validasi berbasis NIK, masalah data ganda dapat diminimalisasi secara signifikan. Hal ini memberikan dampak positif karena bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Penerapan fitur ini sejalan dengan teori Database Management System (DBMS) yang menekankan pentingnya integrasi data dalam sistem administrasi.

Selain itu, efisiensi yang diperoleh dalam pencetakan laporan membuktikan bahwa otomatisasi sistem mampu mengurangi beban administrasi perangkat desa. Waktu yang sebelumnya habis untuk pencatatan manual dapat dialihkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memberikan keuntungan teknis, tetapi juga manajerial dalam meningkatkan produktivitas perangkat desa.

Transparansi juga menjadi aspek penting yang dihasilkan dari penerapan sistem ini. Publikasi daftar penerima bansos secara digital mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya program bantuan. Hal ini mendukung prinsip good governance yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, potensi konflik akibat ketidakjelasan data dapat ditekan.

Namun, penerapan sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi. Meskipun sudah dilakukan pelatihan singkat, dibutuhkan pendampingan berkelanjutan agar sistem dapat digunakan secara konsisten.

Selain itu, infrastruktur teknologi seperti komputer dan jaringan internet juga perlu diperkuat untuk memastikan sistem berjalan optimal.

Secara umum, pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa yang diujicobakan di Desa Bumi Jaya mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintahan desa. Walaupun masih terdapat kendala teknis dan non-teknis, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, bahkan direplikasi di desa-desa lain di Kecamatan Candipuro maupun wilayah Lampung Selatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kerdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dengan topik Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

1. Permasalahan utama dalam pengelolaan bantuan sosial di Desa Bumi Jaya adalah masih digunakannya sistem pencatatan manual. Sistem manual ini menimbulkan berbagai kendala, di antaranya duplikasi data penerima, keterlambatan proses distribusi, dan kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Prasetyo et al., 2022) yang menyatakan bahwa kelemahan administrasi manual sering menjadi penyebab konflik sosial akibat ketidaktepatan sasaran penerima bansos.
2. Rancangan sistem berbasis teknologi informasi yang dihasilkan dari kerja praktik ini terbukti mampu mengatasi sebagian besar permasalahan tersebut. Sistem berbasis database dengan fitur validasi NIK memberikan solusi efektif untuk mencegah data ganda. Selain itu, fitur laporan otomatis dan dashboard monitoring mempermudah perangkat desa dalam memantau penerima bansos secara real-time. Hal ini mendukung hasil penelitian (Noviarani & Chotijah, 2021) yang menyatakan bahwa sistem validasi berbasis identitas tunggal mampu meningkatkan akurasi pendataan bantuan

sosial secara signifikan.

3. Penerapan sistem ini juga meningkatkan efisiensi waktu dan beban kerja perangkat desa. Jika sebelumnya pencetakan laporan membutuhkan waktu 3–4 hari, dengan sistem baru laporan dapat dihasilkan dalam hitungan menit. Efisiensi ini memberikan ruang bagi perangkat desa untuk fokus pada pelayanan masyarakat lain. Seperti dinyatakan oleh (Idrus & Zakiyah, 2022), otomatisasi laporan mampu memangkas waktu administrasi hingga 80%.
4. Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat dengan adanya fitur publikasi data penerima bantuan. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai siapa saja penerima bansos, sehingga potensi kecurigaan atau konflik sosial dapat diminimalkan. Hal ini mendukung prinsip good governance yang menekankan pentingnya partisipasi dan transparansi.
5. kerja praktik ini membuktikan bahwa penerapan Sistem Pengelolaan Bantuan Sosial Berbasis Administrasi Desa di Desa Bumi Jaya mampu memberikan perubahan signifikan dari sistem manual menuju sistem digital yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut serta direplikasi di desa-desa lain sebagai model tata kelola bansos berbasis teknologi informasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis administrasi desa, baik untuk Desa Bumi Jaya maupun

desa-desanya lain.

1. Pemerintah desa perlu melakukan implementasi penuh terhadap sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi digital. Hal ini berarti perangkat desa harus mulai meninggalkan metode manual secara bertahap dan beralih ke sistem berbasis database. Dengan demikian, akurasi data penerima bansos dapat lebih terjamin, dan distribusi bantuan dapat dilakukan tepat sasaran.
2. Diperlukan adanya pelatihan rutin bagi perangkat desa. Meskipun sistem telah dirancang sederhana agar mudah digunakan, tetap dibutuhkan pembekalan teknis mengenai pengoperasian komputer, input data, hingga pencetakan laporan. Pelatihan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak akademisi, mahasiswa, maupun dinas terkait, agar perangkat desa memiliki keterampilan yang memadai.
3. Dari sisi infrastruktur, pemerintah desa disarankan untuk menyediakan sarana pendukung teknologi seperti komputer dengan spesifikasi memadai, perangkat penyimpanan data, serta akses internet yang stabil. Infrastruktur ini merupakan faktor penentu agar sistem dapat berjalan optimal. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, sistem akan sulit dioperasikan secara konsisten.
4. Pemerintah desa meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat memanfaatkan papan informasi digital atau portal desa yang terhubung dengan sistem bansos. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses data penerima bantuan kapan saja, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

5. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi ke database kependudukan kabupaten atau provinsi. Dengan integrasi data lintas instansi, potensi duplikasi penerima bantuan antar desa atau antar program dapat diminimalkan. Hal ini juga akan memudahkan koordinasi antara desa dengan dinas sosial maupun pemerintah daerah.
6. Kerja praktik ini sebaiknya dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan. Pengembangan sistem tidak hanya terbatas pada pengelolaan bansos, tetapi juga dapat diperluas untuk administrasi kependudukan, keuangan desa, dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Desa Bumi Jaya dapat menjadi pelopor dalam penerapan konsep smart village berbasis teknologi informasi.

Meskipun sistem ini memberikan banyak manfaat, terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi. Diperlukan pelatihan berkelanjutan agar sistem dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi, seperti komputer dan jaringan internet, juga perlu diperkuat agar sistem berjalan optimal.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan sistem pengelolaan bansos berbasis administrasi desa yang dirancang dalam kerja praktik ini dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Tidak hanya memberikan manfaat bagi perangkat desa, tetapi juga mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, P. A., & Uzaimah, L. (2024). Tinjauan Terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial Dan Dampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 396–404.
- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143–156.
- Harinin, M. F., Saputra, D., & Harmin, A. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Bansos Berbasis Web. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 1(2), 96–102.
- Idrus, I. A., & Zakiyah, U. (2022). Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. *Journal of Political Issues*, 3(2). <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69>
- Indrajit, R. E. (2002). Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. In *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Kurniawan, A., Octa Indarso, A., Yoga Sembada, W., & Anwar, K. (2021). Pemberdayaan Literasi Digital di Desa Waringin Kurung, Cimanggu Pandeglang. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 2(2). <https://doi.org/10.33753/ijse.v2i2.35>
- Laudon, K., & Laudon, J. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition. In *Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition*.
- Mukhtar, J., Yunus, Y., & Nugroho, I. (2021). Integrasi Kegiatan Masyarakat Budaya Lokal dan Lembaga dalam Pendidikan Toleransi. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 43–57.
- Noviarani, K. I., & Chotijah, U. (2021). Mining Data Kependudukan untuk Validasi Identitas Calon Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Gresik. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(2). <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i2.598>
- Prasetyo, M. A. W., Saputri, D. Y., & Riziana, A. T. (2022). Penentuan Penerima Bantuan Sosial Dana Desa Dengan Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Simple Additive Weighting Method. *Jurnal Komputer Terapan*, 8(2), 296–306.
- Supiyandi, S., Rizal, C., Zen, M., & Eka, M. (2022). PELATIHAN PERANGKAT DESA DALAM PENERAPAN METODE WATERFALL PADA SISTEM INFORMASI DESA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8533>
- Transmigrasi, K., Kesejahteraan, K., Kebijakan, S., Dalam Kerangka, T., Sosial, K., Nasional, K., Lampung, D. P., Febriyanto, S., Tis'aini Latifah, T., Ardiansyah, D., & Angelina, F. (n.d.). Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung. In *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Vol. 25, Issue 2).
- Windari, W. (2021). ****PMD Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan Community Empowerment Model In Production-Based Local Economic Development Effort in Rural Areas. *Jurnal Agirekstensia*, 20(1).
- Wismayanti, K. W. D., & Purnamaningsih, P. E. (2022). Transformasi pelayanan publik melalui e-government di masa era new normal pada pemerintah daerah Badung. *Media Bina Ilmiah*, 16(10), 7507–7518.
- Zaliluddin, D., Budiman, B., & Rully, A. (2020). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT

BERBASIS ANDROID. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 7(2).
<https://doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2052>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Rencana Studi

**INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA**

Jl. ZA. Pagar Alam No.13, Gedung Mereng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
 Website : www.darmajaya.ac.id / e-Mail : info@darmajaya.ac.id / Telepon : (0721) 787214, 781310

Kartu Rencana Studi

N I M : 2211010149 Program Studi : Teknik Informatika - S1
 N A M A : SULASMAN Tahun Akademik : 2024 - Genap
 Semester : 6

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	T	P	Kelas	Ruang	Waktu
1.	TIK21403	Sistem Operasi	4	2	2	4TE3	F28	11:00-14:30
2.	III21204	Kewirausahaan	2	2	2	6T0K1	F27	16:00-20:30
3.	III21211	Pengembangan Bisnis	2	2	2	6S0K1	F25	17:40-19:00
4.	III21410	Kerja Praktik	4	2	2	6T01		09:30-10:30
5.	TIK21437	Algoritma Data Mining	4	2	2	6T0K1	G04	11:50-15:00
6.	TIK21454	Interactive Multimedia	4	2	2	6T0K1	G06	09:30-10:30

Jumlah SKS : 20

Mengetahui/Menyetujui,
 Ketua Program Studi

Mengetahui/Menyetujui,
 Pembimbing Akademik

Bandar Lampung, 17 Maret 2023
 Mahasiswa

Dr. Chairani, S.Kom., M.Tug.
 NIK. 0220056201

YUNI PUSPITA SARI, S.Kom., MTL
 NIK. 02200648502

SULASMAN
 NIM. 2211010149

Lampiran 2. Bukti Pembayaran Kerja Praktek



Detail Transaksi

✕

Informasi Transaksi

Nomor Transaksi	: PAY/20251/0002068
Waktu Pembayaran	: 30 Juni 2025, 15:00:37
Periode Pembayaran	: 2025 Ganjil
Metode Pembayaran	: Shopee 
Status Pembayaran	: Pembayaran Berhasil 

Pemilik Tagihan

Mahasiswa	: SULASMAN (2211010149)
Perguruan Tinggi	: Institut informatika dan Bisnis Darmajaya
Program Studi	: SI - Teknik Informatika

Detail Pembayaran

Kuliah Kerja Nyata / Biaya KP / PKPM (Sekali Bayar)	Rp 1.200.000
SKS (Sekali Bayar)	Rp 2.500.000
Biaya Admin	Rp 4.000
Total Pembayaran	Rp3.700.000

[Kembali ke Transaksi](#)

Lampiran 3. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 4. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 5. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 6. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 6. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 7. Foto Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 8. Foto Validasi data Kegiatan Kerja Praktek

No	Nama Target	NIK	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Alamat	RT	RW	KETERANGAN
201	ABDUL SAUKI ALAWI	1801170303010002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	011	006	
153	ADIKIN	1801171201710001	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DESA BUMIJAYA	008	005	mampu
1	ADILA NISYA ARDANI	3507294905850004	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	-	-	-	
154	AGUS KURNIAWANSYAH	3202391708950007	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	008	005	
141	AGUS PRAWOTO	1801171708980003	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN IV REJO MULYO	010	004	
133	AGUS SALIM	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN IV	009	004	mampu
2	AGUS SAMSUDIN	1602200108810004	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	-	-	-	ganda
202	AGUS SAMSUDIN	1602200108810004	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN VI	011	006	
95	AGUS SUPRIYANTO	1801171210790002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	006	003	
173	AGUS TRIONO	1807030910910003	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN V	012	005	
134	AHMAD	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	009	004	
165	AHMAD MAULANA RIZAL	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN REJOMULYO	009	005	guru honor
178	AHMAD SOLIHIN	1801170504940002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	013	005	mampu
125	AHMAD SYAHRONI	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	008	004	mampu
78	AHMAD TARMUII	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN III	005	003	
96	AHMAD YANI	1801171205640002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DESA BUMI JAYA	006	003	
155	AMAT SUPRIANTO	1801173003990002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN V BUMI REJO DESA BUMIJAYA	008	005	
97	AMINAH	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	006	003	
3	ANIS	1801176001510002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	-	-	-	
142	ANWAR UDIN	1801173003850005	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN IV	010	004	
59	ARDI	1801171202480001	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DESA BUMIJAYA	004	002	
79	ARI ASTUTI	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	005	003	
60	ARIFIN	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN II	004	002	
4	ARIS	3173011703560003	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	-	-	-	
192	ARIS IBRAHIM MOFIQ	1801172308960003	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	007	006	
5	ARIS MUNANDAR	1802062707860003	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	-	-	-	
221	ARISNO	1801171406920001	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	013	006	
203	ARMAN PRIADI	1801172401950001	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DESA BUMI JAYA	011	006	
22	AZIS SUPRAPTO	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN SABUNG SETANGGA	001	001	
61	BARMAWI	0	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	004	002	
193	BOIMAN	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	007	006	
62	BUDI ARISNO	1801171010830015	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DSUSUN II	004	002	
156	BUDI SANTOSO	1801172810900002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN V	008	005	
80	CACA EFANDI	1801171107820006	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	005	003	
6	DAMAN	1801171005430004	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	-	-	-	
113	DARMINO	1801171904540002	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	BUMI JAYA	007	003	
170	DARNO	0	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DESA BUMI JAYA	010	005	anak korea/lbu sakit menahun
7	DEDE SUPARMAN	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	-	-	-	
184	DEDI SUTOMO	3326111206870021	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN V	015	005	
157	DIDI AWANTO	#N/A	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DUSUN V BUMI JAYA	008	005	
23	DWI PRIYATNO	0	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	Candipuro	Bumi Jaya	DESA BUMIJAYA	001	001	

Lampiran 9. surat keputusan rector IIB Darmajaya



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK. 0168/DMJ/DFIK/Dit. AA/Reg/VI-25
Tentang
Dosen Pembimbing Kerja Praktek
Semester Genap TA.2024/2025
Program Studi S1 Teknik Informatika

REKTOR IIB DARMAJAYA

- Memperhatikan :** 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IIB Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam **Kerja Praktek**.
- Menimbang :** 1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Kerja Praktek mahasiswa perlu ditetapkan **Dosen Pembimbing Kerja Praktek**.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :** 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
 7. STATUTA IBI Darmajaya
 8. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
 6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan**
- Pertama :** Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Kerja Praktek mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika.
- Kedua :** Pembimbing Kerja Praktek berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga :** Pembimbing Kerja Praktek yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 10 Juli 2025

a.n. Rektor IIB Darmajaya,
 Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Dr. Muhammad Said Hasibuan, M. Kom
 NIK. 01220905

1. Kepala Program Studi S1 Teknik Informatika
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran 10. surat keputusan rektor IIB Darmajaya

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya
 Nomor : SK. 0167/DNJ/DFEB/DI/AA/REG/VI-25
 Tanggal : 10 Juli 2025
 Perihal : Pembimbing Kerja Praktek Semester Genap TA. 2024/2025
 Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Informatika

Dosen Pembimbing & Tempat Kerja Praktek
 Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Informatika

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	TEMPAT KERJA PRAKTEK	PEMBIMBING
1	DHANI RAHMAT GHAZALI	2111010056	Sulihon Florist	Rahmalia Syahputri, S.Kom, M.EngSc
2	APRILIA PUSPITA SARI	2211010010	Kantor Kepala Desa Kampung Snwijaya Mataram	Yuni Puspta Sari, S.Kom, M.T.I
3	PRANA ALFATH RAIS	2211010107	CV. Bina Karya Nusanantara	Adimas Aglasia, S.Kom., M.T.I
4	YOANI DESI PERMATASARI	2211010130	CV. Bina Karya Nusanantara	Yuda Septiawan, S.Kom, M.T.I
5	FEBY ADELLIA SYAPUTRI	2211010145	Ratce Health & Beauty	Suhendro Yusuf Irianto, M.Kom., Ph.D
6	LIDIA KENCANA	2211010146	LPPK AL AZKA	Amnah, S.Kom, M.T.I
7	NUR RAHMAWATI	2211010148	Kantor Pemerintahan Kabupaten Pringsewu	Riko Herwanto, S.Kom., MTI
8	SULASMAN	2211010149	Kantor Pemerintah Desa Bumi Jaya	Ketut Artaya, S.Kom, M.T.I
9	NINO PARYONO	2211010156	Kantor Pemerintah Desa Bumi Jaya	Rio Kurniawan, M.Cs
10	SELF SAPITRI	2211010157	PT Way Kanan Mulya Perkasa	Septilia Arfida, S.Kom., M.T.I
11	LUSIANA ANGGRIANI	2311018002P	RS. Jawa Daerah Provinsi Lampung	Nisar, S.Kom, M.T
12	NABILAHYAN ANNAKHIEF	2211010101	Kantor Pemerintah Desa Tanjung Agung	Dr. Yuni Akhiansyah, S.Kom, M.Kom

